

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bagian analisis hasil penelitian, maka didapat beberapa kesimpulan dan saran yang penulis kemukakan sebagai masukan mengenai teknik pengawasan Badan Perizinan Terpadu dengan Pemerintah Kelurahan dalam penertiban SITU dan IMB di Kelurahan Oesapa Barat.

6.1 Kesimpulan

1. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) yang menyangkut dengan penertiban SITU dan IMB dilakukan berdasarkan standar yang berlaku baik pengawasan secara langsung yaitu pengawasan yang dilakukan langsung oleh pihak BPPT dalam hal ini monitoring dan penertiban langsung kepada masyarakat yang didalamnya menyangkut teguran langsung ke masyarakat atau lewat kelurahan, dan pengawasan secara tidak langsung yaitu pengawanan yang dilakukan melalui hubungan kerjasama dengan tingkat kelurahan dalam hal pemenuhan persyaratan pengurusan izin SITU dan IMB.
2. Pengawasan oleh Kelurahan Oesapa Barat menyangkut dengan penertiban SITU dan IMB adalah pengawasan yang selalu dilakukan baik itu pengawasan dalam hal administrasi maupun fisik yaitu pengawasan dengan melihat dan menyeleksi syarat-syarat dari pemohon untuk kemudian diteruskan ke BPPT dan pengawasan langsung terhadap

bangunan-bangunan yang ada di dalam lingkungan Kelurahan Oesapa Barat.

6.2 Saran

1. Bagi pemerintah baik BPPT maupun Kelurahan Oesapa Barat agar lebih mementingkan pelayanan yang berbasis prima yaitu benar-benar melayani masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang dikeluhkan masyarakat dan tidak memberatkan masyarakat pada umumnya.
2. Bagi masyarakat agar pelayanan prima yang selalu diperjuangkan pemerintah perlu didukung dan diikuti oleh masyarakat untuk menciptakan dan menghasilkan kenyamanan dan ketertiban dalam hidup berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Brata Kusumah, Dedy Supriady & Dadang Solihin, 2004. ***Otonomi Penyelenggara Daerah***. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hanif Nurcholis, 2007. ***Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah Edisi Revisi***. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- H. Makmur, 2013. ***Kriminologi Administrasi Dalam Pemerintahan***. PT Refika Aditama Bandung.
- Hasibuan, 2006. ***Manajemen Sumber Daya Manusia***. Jakarta Bumi Aksara.
- Handayaniingrat, Soewarno, 1989. ***Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen***. Jakarta CV Haji Masagung.
- Hendra Dermawan Siregar, 2008. ***Kinerja Pemerintah Kelurahan Dalam Program Pemberdayaan Kelurahan***. Jakarta: Usu Repository.
- Ridwan HR. 2006. ***Hukum Administrasi Negara***. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nawawi Hadadi, 1990. ***Metode Penelitian Bidang Sosial***. Jakarta: Gadjah Mada Universitas Press.
- Nawawi Hadadi, 1986. ***Pengawasan melekat di lingkungan aparatur pemerintah***, Erlangga.
- Suradinata, Ermaya, 1995. ***Peranan Kepala Wilayah Dalam Analisis Masalah dan Potensi Wilayah***. Bandung: Ramadhan.
- Sarwoto, 1991, ***Dasar-dasar organisasi dan manajemen***. Ghalia, Jakarta.
- Siagian, S.P, 1989. ***Filsafat Administrasi***. Gunung Agung, Jakarta.
- Situmorang, M. dan Jisuf, F. J, 1994. ***Aspek hokum pengawasan melekat dalam lingkungan aparatur pemerintah***. Renika Cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2010. ***Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum***. Jakarta: PT. Universitas Indonesia.
- Handoko, T. H, 2003. ***Manajemen Edisi 2***. Yogyakarta : BPFE

William N. Dunn, 2000. ***Pengantar Analisis Kebijakan Publik***, terjemahan Samoedra Wibawa . Yogyakarta, Gajah Mada University.

Peraturan Walikota Kupang No 22 Tahun 2009 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Dan Penandatanganan Perizinan Dari Walikota Kepada Kepala BPPT

Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Mekanisme BPPT Kota Kupang

Keputusan LAN (Lembaga Administrasi Negara) No. 589/1999 tentang Penyusunan LAKIP (Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan